

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur pada UU No 20 tahun 2008, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka usaha mikro kecil menengah mendapatkan jaminan dan keadilan usaha, selain itu pemberlakuan ini juga dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan ekonomi, pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan usaha yang perlu mendapat perhatian, karena UMKM merupakan usaha yang terbukti menyediakan lapangan pekerjaan di saat persaingan mendapatkan pekerjaan disektor formal sangat ketat.(Pengrajin et al., 2017)

Permasalahan tentang UMKM salah satunya tidak memiliki informasi keuangan yang transparan terorganisir disebabkan minat yang rendah pada UMKM untuk mencatat dan membukukan setiap transaksi yang telah dilakukan oleh UMKM, permasalahan ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masitoh dan Widayanti, 2015), dari sektor UMKM batik yang ada di Surakarta, ditemukan UMKM belum melakukan pencatatan atau pembukuan hanya sebagian kecil pedagang batik yang penjualannya sudah di luar Surakarta bahkan sampai ekspor, sedangkan yang belum melakukan transaksi hanya tercatat dalam tumpukan nota sehingga pihak owners sulit mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang dijalaninya.(Widayanti, 2015)

Kesulitan dalam mengukur kinerja merupakan salah satu kendala bagi pengusaha dalam mengevaluasi kinerjanya. Hal ini disebabkan karena pengusaha UMKM banyak berfokus pada kegiatan operasionalnya sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan seringkali terabaikan. Tanpa pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik, evaluasi kinerja UMKM tidak mudah dilakukan. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Whetyningtyas (2015) (Whetyningtyas & Mulyani, n.d.) yang melakukan penelitian pada pengusaha bordir dan konveksi di Kabupaten Kudus menyebutkan bahwa kemampuan menyusun laporan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM.

Menurut penelitian Sukmana dan Firmansyah 2014 permasalahan tertinggi dalam laporan keuangan yaitu karena manajemen yang tidak profesional dan tidak mengenal SAK-ETAP. Karena rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan serta tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM dan pelaku UMKM masih merangkap tugas dalam menjalankan usahanya dibidang pemasaran, kegiatan operasi, mengatur SDM dan keuangan serta transaksi juga masih sederhana.

Laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja usaha dan dapat membantu dalam menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha khususnya UMKM. Masalah yang terjadi adalah banyak pelaku UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima/dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli/dijual, dan jumlah piutang atau utang tidak mengikuti pedoman dalam penyusunan laporan

keuangan yang sesungguhnya. Sehingga akan menyulitkan mereka dalam mengukur dan membukukan kinerja usahanya baik atau tidak.(Wahid, n.d.)

Permasalahan yang terjadi bagi pengusaha dalam mengevaluasi kinerja yaitu kesulitan dalam pengukuran kinerja. Hal ini disebabkan pengusaha UMKM banyak berfokus terhadap kegiatan operasionalnya sehingga pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sering terabaikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam usaha mengembangkan UMKM perlu adanya modal yang diantaranya bisa berasal dari pinjaman KUR, dimana bank penyalur KUR mensyaratkan adanya informasi keuangan UMKM. Sebagian besar para pelaku UMKM tidak mampu memberikan informasi laporan akuntansi mengenai kondisi usahanya.(Whetyningtyas & Mulyani, n.d.)

Peningkatan kinerja pada usaha mikro, kecil, dan menengah akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya dan merupakan aspek yang menentukan keberhasilan suatu UMKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat kinerja yang dicapai UMKM merupakan indikator seberapa efisien UMKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya.

UMKM memiliki beberapa kendala yang sangat klasik, seperti kesulitan dalam akses modal sehingga sulit berkembang, kesulitan akses pemasaran, dan pemahaman manajerial yang rendah. Hal yang paling sering terungkap adalah keterbatasan modal dan kesulitan dalam pemasaran. Masalah pembiayaan merupakan hambatan yang paling sering dikeluhkan oleh para pengusaha, baik

usaha kecil maupun usaha besar. Berbagai keluhan yang dialami oleh para pengusaha kecil antara lain antara lain prosedur pengajuan kredit yang rumit, syarat-syarat yang dibutuhkan terlalu banyak, lokasi bank yang jauh dari lokasi usaha, dan kewajiban untuk menyerahkan agunan.

Selain itu, UMKM juga masih dihadapkan pada masalah yang terletak pada proses administrasi. Pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM, seperti melakukan pembinaan dan pemberian kredit lunak. Namun muncul permasalahan baru, para pelaku UMKM diharuskan menyertakan laporan keuangan sebagai syarat mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Sementara hampir semua UMKM tidak memiliki laporan kinerja usaha dan laporan keuangan dengan penerapan akuntansi pada UMKM masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena UMKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan.

Dinas UMKM kota Padang mengelompokkan UMKM dalam beberapa jenis usaha diantaranya kuliner, industri makanan ringan, industri kerajinan tangan, waserda, jasa, PKL, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan nelayan. Industri kerajinan tangan merupakan industri yang sedikit dilakukan oleh para pelaku usaha dibandingkan usaha lainnya yang ada di Kota Padang. Salah satu industri kerajinan yang ada di Kota Padang adalah industri kerajinan rotan. “rotan merupakan salah satu penghasil devisa Negara yang cukup besar. Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor barang kerajinan berbahan dasar rotan dan sebagai pemasok bahan baku produk rotan terbesar di dunia,” kata Staf Ahli

Menteri Perdagangan Bidang Manajemen Djunaedi (22/12/2015) (<https://www.beritasatu.com>). Dari kutipan di atas, Indonesia sebagai pemasok produk industri kerajinan rotan terbesar di dunia dan salah satu penghasil devisa negara yang cukup besar, ini berarti bahwa industri rotan cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai industri lokal.

Selain itu UMKM di sektor kerajinan tangan justru menghadapi masalah sulitnya mengakses permodalan. Kondisi ini membuat UMKM makin sulit untuk bersaing. Menurut Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Hj Mufidah Jusuf Kalla, kendala terbesar yang dihadapi UMKM selain akses permodalan adalah pemasaran, dan teknik produksi. “Karena itu Dekranas memandang perlu pendanaan UMKM dan pembinaan, mengingat banyak potensi kerajinan di Maluku Utara seperti tenun, kerajinan logam, batu bacan dan sebagainya.” <https://Sindonews.com>

Upaya peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan usaha bagi kinerja UMKM telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akan tetapi, pada kenyataannya beberapa usaha cenderung belum memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan akuntansi dalam pengelolaan keuangan usahanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan kebiasaan (pembudayaan) bagi usaha sehingga memiliki kemauan dan kemampuan mengelola keuangan usahanya dengan berbasis pada fungsi-fungsi akuntansi yaitu: pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan, dan pengambilan keputusan.

Apabila persediaan barang dagangan yang dimiliki perusahaan kurang dari yang dibutuhkan maka proses kelancaran perdagangan akan terganggu, kebutuhan pelanggan akan produksi tersebut tidak terpenuhi sehingga perusahaan akan kehilangan konsumen dan kesempatan memperoleh laba akibat habisnya barang dagangan. Apabila persediaan barang baku pada usaha kerajinan rotan mengalami kenaikan harga maka akan mempengaruhi harga jual barang, walau kenaikannya tidak terlalu tinggi. Salah satu dari usaha kerajinan rotan yaitu pada KADAI VINA adalah toko yang menjual berbagai bentuk kerajinan tangan yang terbuat dari rotan. Oleh karena itu, persediaan di KADAI VINA harus dikendalikan guna untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen.

Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan oleh pemerintah mengingat setiap tahun target pertumbuhan ekonomi semakin tinggi tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas UMKM. Pertumbuhan UMKM di arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus menghadapi tantangan global seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Pasar ekonomi Indonesia mempunyai potensi berkembang dengan pesat karena jumlah populasi yang akan tetap tumbuh sehingga kebutuhan akan permintaan dan penawaran pun akan tinggi. Hal ini seharusnya dimanfaatkan para pelaku kinerja UMKM untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri pasar lokal. Melihat banyaknya

tantangan di masa depan membuat para pelaku UMKM semaksimal mungkin mengembangkan usahanya.

Peran UMKM sangat besar, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi negara maju, tetapi juga seluruh negara di penjuru dunia karena UMKM memberikan kontribusi yang berarti pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di setiap negara. Begitu juga dengan Indonesia sebagai negara berkembang, UMKM menjadi pelaku ekonomi dominan dengan jumlah mencapai 56,54 juta unit atau mencapai 99,99% pelaku ekonomi nasional. Menurut Bank Indonesia (2015) UMKM ini berkontribusi terhadap pembentukan PDB menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 58,05% dan mengalami peningkatan menjadi 59,08% pada tahun 2012.(Wardi & Susanto, 2017)

Keberadaan UMKM selama ini telah menjadi sumber kehidupan dari sebagian besar rakyat Indonesia. Yang menjadikan UMKM terus bertahan disaat krisis ekonomi adalah karena, pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua, sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri tanpa bantuan modal dari perbankan sehingga ketika terjadi krisis di sektor perbankan dan suku bunga bank naik maka tidak mempengaruhi kinerja dari UMKM itu sendiri. Ketiga, krisis ekonomi yang berkepanjangan terjadi kasus pemberhentian tenaga kerja di sektor formal.

Peranan UMKM di Indonesia yang dikaitkan dengan pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah disetiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu

masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapatan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya.

Kinerja merupakan ukuran keberhasilan sebuah entitas usaha dalam mencapai tujuannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan, hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut dan tentang apa yang dikerjakan serta bagaimana cara mengerjakannya.

Peningkatan kinerja pada usaha mikro kecil dan menengah akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya dan merupakan aspek yang menentukan keberhasilan suatu UMKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat kinerja yang dicapai UMKM merupakan indikator seberapa efisien UMKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonominya. Meskipun UMKM mempunyai perancang strategis, mengembangkan kinerja UMKM bukan hal yang mudah.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yaitu 59,2 juta. Untuk menumbuhkan jumlah pelaku UMKM yang berselancar di dunia maya, Kemenkop UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)

bersama dengan para pelaku e-commerce menggagas program bertajuk 8 juta UMKM Go Online. Pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi UMKM di Indonesia menuju digital. “Pelaku UMKM harus menjadi pemain utama dari perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kita punya target bagaimana menjadikan 8 juta UMKM ini Go Online pada tahun 2019,” ujar Menteri Kominfo Rudiantara, di kawasan Harmoni, Rabu (15/11). <https://www.kominfo.go.id>

Dalam prakteknya UMKM masih mengalami masalah dalam hal permodalan. Masalah permodalan yang terjadi dalam sektor UMKM menyebabkan minimnya pengetahuan mengakses sumber modal yang tersedia oleh lembaga keuangan. Pelaku UMKM cenderung kurang mengerti sejumlah produk keuangan tawaran lembaga keuangan. Hal itu kemudian memaksa pelaku UMKM bergantung pada pembiayaan perbankan manual dan konvensional. Padahal aspek permodalan sangat dibutuhkan UMKM untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Akibatnya UMKM sering memanfaatkan modal pribadi yang sifatnya terbatas, sehingga dapat memengaruhi kinerja UMKM. Pembiayaan manual perbankan dan konvensional yang diandalkan UMKM tidak cukup untuk menutupi produksi UMKM sehingga dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Salah satu permasalahan yang terjadi di UMKM adalah lemahnya penerapan pencatatan keuangan. Lemahnya penerapan pencatatan keuangan karena pemilik usaha tidak secara lengkap untuk mencatat keuangan yang ada di dalam usahanya, sehingga tidak begitu tau berapa pengeluaran atau pemasukan yang di terima oleh pemilik usaha.

Dilihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap kerajinan rotan telah banyak mendorong industri rotan untuk menawarkan dan memasarkan berbagai jenis kerajinan dengan keunggulan dan daya tarik yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan persaingan di industri kerajinan rotan dalam merebut hati konsumen dan calon konsumen didalam pangsa pasarnya agar pemasaran dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan. Kerajinan rotan di Pitameh Padang sangat pesat perkembangannya, pengrajin-pengrajin yang dulunya bekerja sebagai karyawan biasa sekarang telah beralih profesi menjadi pimpinan kerajinan rotan mereka masing-masing. Dengan banyaknya usaha kerajinan rotan yang baru tentunya semakin memperketat persaingan antar pengrajin rotan dan berpengaruh kepada sistem pemasaran. Dengan persaingan yang ketat ini juga dapat terjadi persaingan yang tidak sehat sehingga dapat merusak harga pasar. Pemasaran kerajinan rotan ini hanya dilakukan dengan pemajangan hasil produksi di toko perabot mereka dan menunggu pembeli yang datang untuk membeli kerajinan rotan. Tempat penjualan kerajinan rotan juga sangat kecil dan tidak permanen sehingga menimbulkan kesulitan dalam memajang kerajinan-kerajinan rotan dan kurang menarik perhatian calon konsumen untuk berhenti membeli maupun hanya sekedar melihat-lihat kerajinan rotan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Sumatera Barat mencatat sebanyak 2.953 UMKM tumbuh di daerah itu selama 2017. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM setempat, Yunisman di Padang, Kamis mengatakan hingga 2017 jumlah UMKM secara keseluruhan di daerah itu telah mencapai 81.182

UMKM. Oleh karena itu pembinaan terus dilakukan agar UMKM terus berkembang, sehingga menghasilkan UMKM yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja. Sedangkan untuk pertumbuhan omset UMKM di Padang mencapai Rp300 juta pertahun. Yunisman menerangkan untuk pengembangan UMKM di daerah itu, pihaknya melakukan berbagai upaya dengan melakukan pembinaan, pendampingan UMKM dan memberikan pelayanan seperti memfasilitasi pendaftaran merek dan label halal. Memfasilitasi perizinan, promosi produk UMKM, serta memberikan berbagai pelatihan bagi wirausaha baru. Padang, <https://www.antarasumbar.com>

Dari data Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 70% dari total hampir 60 juta unit UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Padahal UMKM menempati posisi penting dalam perekonomian tanah air. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2018 kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,34%, serta penyerapan tenaga kerja 116,73 juta orang atau 97,02% dari total angkatan kerja yang bekerja. OJK mencatat, minimnya penyaluran pembiayaan bagi UMKM lantaran kendala administratif, serta manajemen keuangan dan bisnis yang umumnya masih dikelola secara manual. <https://www.detikfinance.com>

Besarnya peran UMKM dalam struktur ekonomi dibuktikan juga dengan semakin besarnya perhatian negara-negara maju terhadap UMKM dinegaranya. Setelah krisis keuangan 2008, Uni Eropa melakukan transformasi regulasi disemua negara anggotanya untuk memberi ruang yang lebih luas terhadap UMKM. Penguatan UMKM di Indonesia merupakan bagian dari langkah

pemerintah melakukan percepatan industrialisasi. Sebab usaha di sektor tersebut telah terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, dan berperan strategis mendukung ketersediaan pangan nasional.

Berdasarkan hasil riset world bank, ada empat permasalahan yaitu tidak punya akses pembiayaan, tidak punya akses dan peluang usaha, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM, regulasi dan birokrasi. UMKM menyumbang terhadap PDB hingga 60,34%. Presiden Joko Widodo mengatakan UMKM harus naik kelas. Tidak boleh hanya bertahan di usaha kecil saja. Levelnya harus naik seperti disejumlah negara tetangga, “ ujar Iskandar dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, **Jakarta**, jumat (6/7/18).”

Pencatatan keuangan merupakan proses memasukkan data-data keuangan ke dalam media sistem pencatatan yang dapat berupa buku, yaitu pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Jika sistem pencatatan data keuangan berupa perangkat komputer, pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui keyboard. Kesalahan paling umum dilakukan UMKM dalam mengelola keuangan adalah mencampurkan uang usaha dengan uang pribadi. Pemilik berfikir tidak masalah jika mencampur uang usaha dengan uang pribadi. Namun, yang kebanyakan terjadi sulit membedakan pengeluaran pribadi dan usaha. Dengan begitu keperluan pribadi sedikit demi sedikit menggerogoti saldo keuangan usaha.

Laporan keuangan merupakan alat bagi perusahaan untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan

informasi yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemasok untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan ini dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (2018:3) adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.(Amatullah, Hariyadi, & Andrianto, 2019)

Menurut Mutegi dkk (2015) kinerja UMKM adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu dan menyesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam satu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan individu tersebut bekerja.(Yani & Musdholifah, 2017)

Menurut Islami A.C., et al (2017) didalam mengukur kinerja UMKM dibutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dimana tidak hanya didasarkan pada alat ukur finansial saja tetapi juga alat ukur non finansial disesuaikan dengan tujuan dari sebuah pengukuran. Untuk mengukur kinerja finansial UMKM dilakukan dengan melihat indikator keuangan meliputi tingkat keuntungan, tingkat penjualan, dan efisiensi biaya .(Alimudin, Falani, Mudjanarko, & Limantara, 2019)

Menurut Nugroho (2016:15) Umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis.

Menurut Soemarso (2015) proses pencatatan berarti mengumpulkan data transaksi secara kronologis, kemudian mengelompokkan dan menggolongkan dalam akun-akun agar lebih ringkas dan selanjutnya pengikhtisaran dari informasi yang telah digolongkan ke dalam bentuk laporan yang diinginkan pemakai.

Menurut Wijono (2015) penerapan pencatatan keuangan merupakan proses memasukkan data keuangan ke dalam media sistem pencatatan yang berupa buku, yakni pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Jika sistem pencatatan data keuangan berupa perangkat komputer, pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui keyboard. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. (Pratama, Wijayangka, Bisnis, Komunikasi, & Telkom, 2019)

Menurut Tarmizi (2015) mengatakan bahwa hampir semua UMKM di Indonesia hanya mencatat keuangan dari sumber masuk dan sumber uang. Dengan kata lain, pelaku UMKM hanya mencatat keuangan usahanya sesuai dengan arus kas tanpa bisa memperkirakan akrual pelaporan. (Lohanda & Mustikawati, n.d.)

Menurut Dawuda (2015) mengungkapkan bahwa efek bagi pemilik UMKM yang tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik adalah pemilik

tidak dapat melakukan analisis keuangan untuk mengetahui apakah bisnis mereka berjalan dengan baik atau tidak.(Akuntansi, Ekonomi, & Semarang, 2018)

Menurut Rahomon (2015) pencatatan keuangan yang buruk akan menyebabkan kinerja keuangan menjadi buruk dan catatan keuangan yang baik, tertib dan teratur dapat menjaga kinerja keuangan perusahaan skala kecil yang lebih baik.

Menurut Andrianto,dkk (2017) pencatatan harus sesuai dengan setiap transaksi yang terjadi dan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi mempunyai perlakuan akuntansi mulai pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan, dan tentunya dapat menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan yang andal.(Savitri, 2018)

Menurut S. Mulyawan (2015) laporan keuangan merupakan alat pengujian dari pekerjaan bagian pembukuan yang digunakan untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan.(Purwanti, n.d.)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) pelaporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan.

Menurut Hans Kartikahadi (2016) laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti : pemegang saham, kreditor, serikat pekerja, badan pemerintah, manajemen.

Menurut Widjaja (2019) dalam menyusun laporan keuangan sebaiknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus disiplin dalam melakukan pencatatan setiap transaksi dalam jurnal atau laporan keuangan, lalu mendokumentasikan setiap bukti-bukti transaksi sehingga mempermudah dalam proses pencatatan keuangan.

Penelitian ini menggunakan umur perusahaan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono,2016). Menurut Kartika (2009) yang dikutip dari Mustika (2012), umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan di bursa. Sedangkan menurut Widiastuti (2002) dalam Rahmawati (2012), umur perusahaan dapat menunjukkan seberapa lama perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Yularto dan Chariri yang dikutip dari Istansi (2009) juga mengemukakan bahwa umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Menurut Owusa dan Ansah (2000) yang dikutip dari Bestivano (2013) menjelaskan bahwa umur perusahaan dapat diukur dari tanggal pendiriannya maupun dari tanggal terdaftarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Pencatatan Keuangan dan Pelaporan Keuangan terhadap Kinerja UMKM dengan Umur Perusahaan sebagai Variabel Kontrol pada Usaha Kerajinan Rotan di Kota Padang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. UMKM memiliki kesulitan dalam akses modal, akses pemasaran dan pemahaman manajerial yang rendah
2. Para pelaku UMKM diharuskan menyertakan laporan keuangan sebagai syarat mengajukan pinjaman kepada pihak bank
3. Hampir semua UMKM tidak memiliki laporan kinerja usaha dan laporan keuangan dengan penerapan akuntansi pada UMKM masih terbatas
4. Permasalahan yang terjadi bagi pengusaha dalam mengevaluasi kinerja yaitu kesulitan dalam pengukuran kinerja
5. Perlu upaya untuk menumbuhkan kebiasaan bagi usaha untuk mengelola keuangan usahanya dengan berbasis pada fungsi-fungsi akuntansi
6. Menurut Kemenkop UKM sebanyak 3,79 juta UMKM sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produk
7. Lemahnya penerapan pencatatan keuangan karena pemilik usaha tidak secara lengkap mencatat keuangan yang ada didalam usahanya
8. Pertumbuhan umkm dan tingginya persaingan membuat umkm harus menghadapi tantangan global
9. Umkm di Indonesia harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah
10. Umkm tidak dibiasakan melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan

1.3 Batasan Masalah

Dengan melihat masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu pengaruh penerapan pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan terhadap kinerja UMKM dengan umur perusahaan sebagai variabel kontrol pada usaha kerajinan rotan di Kota Padang (2018).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan pencatatan keuangan terhadap kinerja UMKM pada usaha kerajinan rotan di Kota Padang ?
2. Bagaimana pengaruh pelaporan keuangan terhadap kinerja UMKM pada usaha kerajinan rotan di Kota Padang ?
3. Bagaimana pengaruh umur perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap kinerja UMKM pada usaha kerajinan rotan di Kota Padang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan pencatatan keuangan terhadap kinerja umkm pada usaha kerajinan rotan di Kota Padang.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pelaporan keuangan terhadap kinerja umkm pada usaha kerajinan rotan di Kota Padang.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh umur perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap kinerja UMKM pada usaha kerajinan rotan di Kota Padang

1.6 Manfaat Penelitian

1. Peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

2. Bagi perusahaan

Bagi umkm yang menjadi objek penelitian kali ini penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan saran-saran yang penulis kemukakan untuk menyempurnakan tidak menyalahi legalitas peraturan penghindaran pajak indonesia.

3. Bagi akademis

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama.